

JAKARTA (*Media*, 19-01-04): Pasokan gas untuk industri pupuk di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama kuartal I 2004 belum mencukupi kebutuhan meski ada pasokan sebanyak 73-75 juta kaki kubik per hari. Jumlah tersebut hanya cukup untuk kebutuhan pemeliharaan pabrik dan listrik masyarakat setempat.

Sampai saat ini pabrik-pabrik pupuk di Aceh belum memproduksi, sehingga mereka meminta tambahan pasokan. Direktur Utama PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), Rauf Purnama, dan Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Hidayat Nyak Man, mengungkapkan hal tersebut di sela-sela Pertemuan Kedua Stake Holders Bidang Migas di Istana Bogor, akhir pekan lalu. "Pabrik AAF dan PIM I hanya kebagian alokasi gas sebesar 7 juta kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMSCFD). Itu hanya cukup untuk listrik dan pemeliharaan saja. Sisanya lagi untuk menghidupkan pabrik pupuk baru PIM II yang akan diresmikan Presiden sebentar lagi," jelas Rauf.

Idealnya, alokasi gas untuk operasional normal satu pabrik pupuk dengan kapasitas produksi 600.000 ton per tahun membutuhkan bahan baku gas 50-60 MMSCFD. Jadi, kebutuhan untuk tiga pabrik pupuk di Aceh mencapai 150-160 MMSCFD supaya bisa memproduksi lagi, itu pun masih kekurangan 85 MMSFD. Padahal, khusus AAF dan PIM I, yang sudah berhenti operasi akhir tahun lalu, masih mempunyai kontrak penjualan pupuk di luar dan dalam negeri. Seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas dari ladang gas Arun ke AAF sejak awal 2003 terakhir kali pabrik itu memproduksi urea pada Agustus 2003. Mulai saat itu operator ladang gas Arun, ExxonMobil Oil Indonesia menyetop pasokan gas ke AAF. Produksi urea yang dihasilkan baru mencapai 200.000 ton sedangkan target produksi 600.000 ton.

Perlu negosiasi

Padahal, selama 2002, AAF bisa meraup keuntungan US\$22 juta sebelum pajak dari produksi ureanya. Sehingga tahun 2003 ada potensi kerugian dari keuntungan penjualan pupuk sebesar US\$21 juta per tahun dan biaya operasional US\$6 juta. Beberapa tahun terakhir ini mayoritas produksi AAF diekspor ke negara-negara ASEAN.

Hal senada diungkapkan Dirut PT PIM Hidayat Nyak Man, PIM I belum mulai produksi lagi. Sedangkan produksi urea dari PIM sebesar 570.000 ton per tahun sangat dibutuhkan masyarakat Aceh dan Sumatra Utara. "Kita masih menunggu perkembangan tiga sampai empat bulan ini. Jika pemerintah belum juga mengambil tindakan bisa saja pabrik ini kita tutup," jelas Hidayat. Sementara, mengenai penutupan operasi AAF Rauf mengatakan soal itu akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham PT AAF Februari ini. Tetapi, semua itu tergantung pada keputusan para pemegang saham dari negara-negara ASEAN. Sebelumnya, sesuai sidang kabinet terbatas baru-baru ini pemerintah memberikan pasokan gas untuk tiga pabrik pupuk di Aceh sebesar 73-75 MMSCFD selama kuartal I 2004.

Namun, pada kenyataannya jumlah sebanyak itu tidak mencukupi kebutuhan, sehingga industri pupuk meminta tambahan gas lagi ke pemerintah. Menyikapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan bisa saja pemerintah mengalihkan sebagian alokasi gas untuk dua unit baru pabrik PT Pupuk Kaltim ke pabrik pupuk di Aceh.

Tetapi, hal itu membutuhkan waktu dan proses teknis yang cukup lama. Jika harus mencari

LNG di pasar internasional sebagai pengganti gas untuk pupuk, tentu harganya lebih tinggi sehingga perlu dilakukan negosiasi dulu. Kalaupun harganya sudah cocok, pihaknya tetap harus berkonsultasi lagi dengan Depkeu untuk membicarakan pembayarannya. Selisih harga jika membeli LNG di pasar internasional tentunya harus dibayar pemerintah.

Setelah itu, baru bisa diketahui berapa jumlah pengiriman gas untuk tiga pabrik pupuk di Aceh. Wakil Kepala BP Migas Kardaya Warnika menambahkan untuk mengatasi krisis gas bagi industri pupuk, pihaknya baru memenuhi komitmen sebesar 75 MMSCFD atau sama dengan satu kargo LNG. Kargo LNG untuk mengganti stok gas yang dipakai untuk pabrik pupuk itu didapat dari Oman. Padahal, untuk kebutuhan tiga pabrik pupuk dibutuhkan setidaknya 5-8 kargo LNG. (Wis/E-3)